

**Spiritualitas Islam
dan Gerakan Politik Ingkar NKRI
(Studi terhadap Gerakan Politik HT di Indonesia)**

Zusiana Elly Triantini

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

The presence of Reformation Order in Indonesia bears new Islamic spirituality in various forms, and one of them is the birth of Hizbut Tabrir Indonesia (HTI) which represents Hizbut Tabrir (HT) in the Middle East. The members claim that HTI is an ideological political party which is based on Islamic doctrines and its dakwa is based on the obligation to uphold khilāfah Islāmiyah supported by fikrah (idea) as a means for change. This group has issued some controversial fruits of ijtihads on politics which lead to pro and con among the debate on the discourse of upholding democracy in Indonesia. They reject historical interpretation. If they admit explanation on when, where and background of quranic verses, they will stop on textual understanding. Events surrounding the revelation of verses are only understood as historical background which should be adopted and duplicated into our modern live. The verse cannot be interpreted out of the text. There is no critique on previous understandings. They interpret the text and disregard previous interpretation. These paper is presented simply affirms that new islamic spirituality in Indonesia has many influences to NKRI.

Abstrak

Kehadiran Orde Reformasi di Indonesia diwarnai dengan spiritualitas Islam baru dalam berbagai bentuk, dan salah satunya adalah lahir dari Hizbut Tabrir Indonesia (HTI) yang mewakili Hizbut Tabrir (HT) di Timur Tengah. Para anggota menyatakan bahwa HTI adalah partai politik ideologis yang didasarkan pada doktrin Islam dan dakwah yang didasarkan pada kewajiban untuk menegakkan khilāfah Islām dan Dakwah Islamiyah didukung oleh fikrah (ide) sebagai sarana untuk perubahan. Kelompok ini telah mengeluarkan beberapa buah kontroversial ijtihad tentang politik yang mengarah pada pro dan kontra di antara perdebatan tentang wacana penegakan demokrasi di Indonesia. Mereka menolak interpretasi sejarah. Jika mereka mengakui penjelasan tentang kapan, di mana dan latar belakang dari ayat-ayat Al-Quran, mereka akan berhenti pada pemahaman tekstual. Penabuhan dari ayat-ayat hanya dipahami sebagai latar belakang sejarah yang harus diadopsi dan digandakan ke dalam hidup modern kita. Ayat ini tidak

bisa ditafsirkan di luar teks. Tidak ada kritik pada pemahaman sebelumnya. Mereka menafsirkan interpretasi teks anddisregard sebelumnya. Makalah ini disajikan hanya menegaskan bahwa spiritualitas Islam baru di Indonesia memiliki banyak pengaruh kepada NKRI.

Kata Kunci: *Spiritualitas Islam, HTI, NKRI*

A. Pengantar

Kuatnya pengaruh spiritualitas Islam dalam ranah pemahaman dan politik telah mendorong munculnya berbagai gerakan Islam politik, yang mengukur semua diskursus kehidupan ummat dengan ketentuan Tuhan. Cara pandang yang demikian juga terekspresikan dalam gerakan politik ideologis. Dari sinilah muncul ungkapan bahwa gerakan Islam politik seringkali menggunakan nama Tuhan sebagai bentuk pengejawantahan spiritualitasnya.

Dalam konteks Indonesia, gerakan Islam Politik tidak bisa lepas dari pergumulannya dengan berbagai kondisi sosial, politik dan keagamaan yang prural dan terus berkembang. Berbagai unsur ini kemudian mampu melahirkan corak pemikiran politik Islam yang fundamental, bahkan radikal. Pada akhirnya spiritualitas Islam politik yang berkembang dari terbukanya kran demokrasi kemudian menjadi ajang pertarungan berbagai wacana, persepsi, dan menjadi simbol tradisi yang akan terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan dalam masyarakat.

Dalam konteks yang lebih spesifik, fenomena transformasi spiritualitas Islam politik juga terjadi pada gerakan politik transnasional HTI. Di satu sisi benih-benih persemaian ideologi HTI semakin tampak, namun di sisi lain aura penolakan terhadap terminologi Khilafah juga masih sangat dominan.

Sebuah riset mantam anggota HTI menyimpulkan bahwa ideologi yang dikembangkan oleh HTI adalah ideologi utopis yang tidak akan dapat tercapai hingga kapanpun.¹ Analisa ini juga tidak lepas dari perspektif epistemologi keislaman HTI yang pada umumnya tekstual, tidak kritis atas warisan pemikiran klasik, serta *mindset* mereka yang lebih cenderung bernostalgia dengan sejarah masa lalu. Tidak mengherankan

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹Ainu Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tabrir Di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012).

jika sebagian besar masyarakat menolak ideologi tersebut karena sistem pemerintahan yang di tawarkan oleh HTI tidak jelas dan sejarah juga mencatat bahwa sistem Khilafah juga sistem politik yang mempunyai kecacatan.

Meskipun secara ideologis dagangan politik HTI mendapatkan penolakan dari masyarakat dan HTI saat ini tergolong kelompok politik ideologis yang non-radikal, namun negara dalam hal ini pemerintah Indonesia harus memiliki regulasi yang jelas untuk mengatur atau menata organisasi semacam HTI yang tidak pernah kenal menyerah memperjuangkan tegaknya Khilafah atau negara Islam di Indonesia. Langkah HTI yang semakin melebarkan sayapnya untuk terus memperjuangkan Khilafah hingga tahap revolusi bukan masalah yang dapat dipandang sebelah mata oleh negara. Perjuangan mereka yang saat ini berada pada tahapan interaksi atau revolusi pemikiran merupakan bentuk aktifitas yang mengancam eksistensi ideologi bangsa. Penulis dalam hal ini mengkategorikan HTI sebagai gerakan politik ideologis yang mengingkari ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Embrio Spiritualitas Islam di Indonesia

Berkembangnya gerakan Islam yang aktif mendengungkan peberlakuan syari'at Islam dan khilafah adalah bentuk dari implikasi politik dan sosial yang harus ditanggung dari diterapkannya demokrasi di Indonesia. Meskipun kelompok Islam Syari'at ini dapat berkembang karena terbukanya kran demokrasi di Indonesiam namun keberadaan mereka justru melawan arus demokrasi. Kelompok ini berkeyakinan bahwa diterimanya sistem demokrasi merupakan penyebab utama krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk meruntuhkan sistem demokrasi dan menggantinya dengan konsep lain yaitu khilafah islamiyah atau daulah islamiyah.

Memang jika menilik sejarah berdirinya bangsa ini, perjuangan pendirian negara yang bedasar pada term Islam atau negara Islam telah muncul sejak awal. Lintasan sejarah menyebut Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo sebagai tonggak kehadiran kelompok Islam Syari'at di Indonesia, yang salah satu cita-citanya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia. Nama lain adalah Kahar Muzzakar, yang sempat berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat Wakil Komandan Pasukan Gerilyawan di Jawa Timur prakemerdekaan merupakan salah satu figur revolusioner yang meneruskan Darul Islam.

Meskipun gerakan DI/TII telah dibumi hanguskan pada masa kepemimpinan Soekarno, namun virus perjuangan dan semangat pendirian negara Islam masih berhembus hingga sekarang. Hanya saja kemunculan perjuangan penegakan negara Islam saat ini berbeda dari sisi tingkat gerakannya. Jika NII berkembang sebagai gerakan produk lokal (nasional), Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan impor yang bersifat transnasional.

HTI muncul bersamaan dengan gerakan Islam lainnya seperti MMI, KPPSI yang mengejawantah sebagai gerakan spiritualitas Islam model baru di Indonesia. HTI menggunakan konsep *kebilāfah* sebagai solusi terpuruknya sistem politik dan pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Mereka mengaku sebagai partai politik Ideologis yang melandaskan gerakan dan ajarannya pada Islam dan dakwahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan *kebilafah Islamiyah* dengan bertopang kepada *fikerah* (ide) sebagai sarana paling pokok dalam perubahan. Kelompok ini telah mengeluarkan ijtihad-ijtihad *syar'i* tentang politik yang cenderung kontroversial dan mengundang pro dan kontra di tengah pergulatan wacana penegakan demokrasi di Indonesia.

Kelahiran HT di Indonesia dibidani dan dipelopori oleh beberapa orang anggota dan simpatisan HT yang telah bersentuhan langsung dengan gerakan ini di Timur Tengah, sehingga nama, bentuk, doktrin, ideologi dan metode gerakannya benar-benar mengikuti HT di Timur Tengah. Bahkan HTI merupakan cabang dari jaringan HT Internasional dan bertanggungjawab kepada pengurus pusat HT di Yordania.²

Pada awalnya Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Nabhani (1909-1979)³, Nabhani terlahir di kota Ijzim, sebuah kampung di daerah Haifa, Palestina. Setelah belajar di kampung halamannya, ia melanjutkan studinya di al-Azar dan Dar al-Ulum, Kairo. Nabhani pernah beberapa kali menjadi dosen dan hakim di kota Palestina. Setelah peristiwa tahun 1948⁴, Nabhani bersama keluarga meninggalkan kampung halaman

² M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 162.

³ WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Akar Ideologis dan Penyebarannya*, (Jakarta: Al-Fithom Cahaya Umat, 2002), hlm. 88, Dalam literatur lain menyebut tahun yang berbeda yaitu 1908-1977, lihat dalam *Hizbut Tabrir, Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tabrir*, terjemahan Abu Afif dan Nurkholis (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002), hlm 34. Bandingkan dengan *Al-Waie* No 67 Tahun VI, Edisi Khusus Maret 2006, hlm 57.

⁴ Ada pula literatur yang menuliskan bahwa HT di dirikan oleh Nabhani pada 1953 lebih jelas lihat HTI, *Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tabrir* (Bogor: HTI, 2002), hlm 34.

menuju Beirut. Kemudian Nabhani diangkat menjadi anggota di Mahkamah Banding Bait al-Maqdis (Yerusalem). Nabhani mendirikan partai dan konsentrasi penuh terhadap partai pada tahun 1952⁵, pada tahun ini Nabhani mendaftarkan partai yang didirikannya tersebut. Akan tetapi, pendaftaran partai tersebut ditolak oleh pemerintah Yordania karena dianggap membahayakan stabilitas negara⁶. Oleh karena hal inilah perkembangan HT di kemudian hari berada di luar struktur negara, bahkan sempat melakukan kudeta terhadap negara.

Sepeninggal Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zallum, seorang laki-laki kelahiran kota Khalil, Palestina. Zallum adalah penulis buku-buku yang juga dijadikan pedoman bagi Hizbut Tahrir pada masanya. Sepeninggal Zallum pada April 2003, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh 'Atha Abu Rusyta, seorang sarjana Teknik Sipil dari salah satu perguruan tinggi di Kairo, kelahiran Khalil, Palestina pada tahun 1943. 'Atha Abu Rusyta berasal dari latar belakang keluarga yang tingkat keberagamaannya seperti masyarakat secara umum. Ia mulai bergabung dengan HT ketika ia sedang menempuh pendidikan menengah. Ia juga pernah beberapa kali dipenjara karena perjuangannya. Sampai sekarang ia masih dipercaya untuk berada pada pucuk pimpinan HT secara Internasional.⁷

Pengembangan sayap gerakan HT berkembang pesat. Kini, dakwah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir telah merambah ke berbagai negara di dunia termasuk salah satunya adalah Indonesia. Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia bermula dari Ustaz Mama Abdullah bin Nuh, pengelola Ponpes Al-Ghazali Bogor yang juga dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada suatu hari Mama Abdullah bin Nuh mengajak Ustaz Abdurrahman al-Baghdadi⁸ yang merupakan aktifis Hizbut Tahrir

⁵ WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran...*, hlm 88.

⁶ Lihat dalam Sheikh Salim Ibn Led Al-Hilali, *Al Jamā'ah al-Islāmiyah fi Za'ul al-Kitab wa al-Sunnah bi Fahmi Salaf Al-Ummah*, Terj. Abu Ihsan (Solo: Pustaka Imam Bukhari, 2004) hlm. 162, lihat juga dalam M Zainudin, *Perjuangan Pengambilan Kekuasaan Studi Tentang Kiblahah Perspektif Hizbu Tahrir Indonesia*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm 38-39.

⁷ Ia terpilih sejak 13 April 2003. lebih lanjut lihat dalam qalbusalim.wordpress.com

⁸ Dalam literatur lain disebut bahwa tidak jelas kapan HTI didirikan di Indonesia, namun ideologi Hizbut Tahrir telah hadir di Indonesia sejak Taqiyuddin an Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972. lebih jelas lihat Muhammad Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI; The Image of The Others" dalam A. Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro dan SR-Ins Team, *Negara Tuban The Thematic Enciclopedia...*, hlm 694.

yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor. Kesempatan ini digunakan oleh Abdurrahman untuk berinteraksi dengan aktifis Islam di Masjid Al-Ghifari IPB, Bogor. Pemikiran Abdurrahman ternyata mendapat tanggapan yang sangat baik dari para aktifis masjid tersebut, dari sinilah mulai dibentuk halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Melalui lembaga-lembaga dakwah kampus gagasan Hizbut Tahrir mulai menyebar ke luar Bogor dan akhirnya ke seluruh Indonesia.⁹

Ustadz Mama Abdullah Bin Nuh wafat pada tahun 1987,¹⁰ kepemimpinan selanjutnya dipercayakan kepada Muhammad al-Khaththath hingga saat ini, dan sebagai juru bicaranya adalah Muhammad Ismail Yusanto yang dalam beberapa kesempatan lebih sering muncul daripada Muhammad al Khaththath.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa terjadi perpecahan di tubuh HTI, dimana Muhammad al-Khaththath bersebrangan pendapat dengan Ismail Yusanto terkait dengan strategi politik HTI. Akan tetapi, isu perpecahan ini tidak terlalu terdengar keluar karena terkesan ditutup-tutupi dan disembunyikan.

C. Paham Politik HTI sebagai Gerakan Politik Ingkar NKRI

1). Negara dan Pemerintahan dalam Perspektif HTI

Negara menurut Hizbut Tahrir terbagi menjadi dua jenis; *pertama*, *Dar al Islam* (Negara Islam) yang menerapkan sistem hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam aspek pemerintahan meskipun mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam. *Kedua*, *Darul Kufur* (Negara kufur), yaitu negara yang menerapkan sistem hukum kufur dalam setiap aspek kehidupannya meskipun mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.¹¹

Secara teoritik negara Islam adalah negara Allah SWT, negara yang memberlakukan syari'at Islam, dan kedaulatan di tangan Allah SWT. Negara Islam memiliki tiga komponen penting sebagai prasyarat

⁹ Lebih lanjut lihat Majalah Islam *Sabili* No.9 th.X 2003, "Sejarah Emas Muslim Indonesia", hlm 143

¹⁰ Pada tahun ini HTI pusat di bawah kepemimpinan Zallum.

¹¹ Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish (Jakarta, Pustaka Thariql Izzah, cet 3, 2002), hlm. 109

berdirinya negara Islam antara lain; masyarakat Islam, hukum Islam, dan *kehalifah*.¹²

Hasan Al-Turabi mengungkapkan bahwa negara Islam memiliki landasan teologis antara lain; negara Islam tunduk pada doktrin tauhid dan menolak sekularitas, negara Islam tidak dibatasi oleh wilayah teritorial (nasionalitas) karena kesetiaan utama adalah kepada Tuhan, baru kemudian manusia sehingga tidak ada batas kesetiaan dikarenakan teritorial maupun etnis, negara Islam bukanlah suatu kesatuan yang berdaulat karena tunduk kepada norma-norma syari'at dan mewakili kehendak Tuhan.¹³

Sedangkan negara yang tidak memaktekkan norma-norma syari'at dan menggunakan model pemerintahan jenis apapun di luar *kehalifah* merupakan negara kufur yang dalam hal politik wajib dibantah dan "diperangi". Negara model ini akan menerapkan kedaulatan di tangan rakyat atau penguasa, oleh karena itu ia sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan Tuhan sebagaimana negara Islam anut.

Berkaitan dengan model pemerintahan Hizbut Tahrir mengkritik konsep pemerintahan desentralisasi¹⁴ yang ada dalam pemerintahan demokrasi, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Desentralisasi menurut HTI akan melahirkan koruptor-koruptor di tingkat daerah. Dan permasalahan kebijakan daerah akan menjadi sulit untuk dikontrol, termasuk dalam hal ini pengaruh modal asing terhadap daerah tersebut,¹⁵ bahkan mereka menganggap bahwa kebijakan negara merupakan konspirasi besar yang harus dihancurkan.

Hizbut Tahrir mengharamkan parlemen yang tidak menjunjung tinggi syari'at Islam, dan memilih wakil rakyat dengan menggunakan pemilihan umum olehnya dikatakan sebagai sesuatu yang mubah dan

¹² Javid Iqbal, "Demokrasi dan Negara Islam Modern" dalam John L Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem dan Prospek*, terj. Rahman Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 321-322, lihat juga dalam Khamami Zada, *Islam...*, hlm. 110.

¹³ Hasan Al-Turabi, "Negara Islam" dalam John L Esposito, *Demokrasi...*, hlm 306-307.

¹⁴ Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk memusatkan kekuatan dan kemampuan untuk mengurus daerahnya sendiri.

¹⁵ Seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini, yang pada awalnya sering dimunculkan wacana "sami siaga" kini muncul "Puskesmas poliklinik siaga" di desa-desa yang menjadikan kebutuhan peralatan medis semakin meningkat dan modal asing mudah sekali untuk masuk karena dana negara tak mencukupi.

dapat berubah menjadi haram apabila ada perkara yang mengantarkannya.¹⁶ Demokrasi di Indonesia merupakan salah satu contoh paling nyata bobroknya demokrasi karena dalam pemerintahan yang berdasarkan pada demokrasi terdapat persaingan untuk mengunggulkan kepentingan golongan masing-masing.

Pemberlakuan syariat Islam merupakan penunjuk jalan bagi tersesatnya negara dari sekularisme yang telah dianut beberapa tahun, namun perjuangan untuk menegakkan syariat Islam membutuhkan kerja maksimal, selain dukungan mental bantuan yang dibutuhkan adalah dana serta dorongan dari negara-negara Islam yang berpihak. Berbagai hambatan dan tantangan harus dihadapi guna mewujudkan cita-cita tersebut.

Hizbut Tahrir menyayangkan kebangkitan Umat Islam masa kini yang telah kehilangan gambaran jelas mengenai *ṭarīqah Islāmīyyah* yang dalam hal ini banyak diperankan oleh negara karena negara merupakan institusi yang paling bertanggung jawab besar dalam jihad untuk realisasi Tariqah Islamiyah.

Kebangkitan Islam yang ditandai dengan pembangunan masjid, penerbitan buku-buku, tulisan-tulisan atau karangan, mendidik akhlak dll, bukan merupakan kebangkitan yang nyata apabila pada saat yang sama kepemimpinan yang kufur masih menguasai dan menjajah umat Islam.¹⁷ Gambaran seperti inilah yang selalu ditampilkan HTI bila melihat tentang Islam di Indonesia saat ini.

Struktur pemerintahan dalam pespektif Hizbut Tahrir berdiri di atas delapan struktur, dengan urutan sebagai berikut;

1. Khalifah (Kepala Negara)
2. Mu'awin Tafwīd (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
3. Mu'awin Tanfiz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
4. Amīrul Jihād (Panglima Perang)
5. Wali (Pimpinan Daerah Tingkat 1)
6. Qāḍi (Hakim)
7. Majelis Daulah (Departemen Negara)
8. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat)

¹⁶ Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal...*, hlm 122.

¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafāhim Hizbut Tahrīr*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: HTI, 2001), hlm. 8-9

Model struktur ini berdasar pada struktur negara yang dibangun oleh Rasulullah saw. Untuk struktur *mu'āwin* diqiyaskan pada diangkatnya para shahabat (Abu Bakar dan Umar bin Khatab) sebaai *mu'āwin* Rasulullah.¹⁸

Ide-ide dan pemikiran yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir maupun Hizbut Tahrir Indonesia selalu terlihat sebagai ide atau pemikiran yang fundamental dan agregatif, dalam arti semangat penegakan *kebilāfah* yang diangkat oleh HT dan tentu saja HTI selalu nilai-nilai politik yang berasal dari romantisme masa lalu, dan cenderung memiliki penafsiran yang tekstual sehingga banyak mengundang kontroversi.

Apabila ditilik dalam sejarah perpolitikan Indonesia agenda perjuangan yang senada dengan HTI (tentang penegakan syari'at Islam) telah lama muncul, seperti perjuangan DI TII, SI, NII di masa lalu dan sekarang MMI, KPPSI namun HTI memiliki kekhasan dengan tampilan yang cenderung lebih halus, dan lebih bergerak pada ranah pemikiran.

2). Partai Politik dalam Perspektif HTI

Secara epistemologi partai politik adalah organisasi yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Ideologi yang dimaksud adalah kumpulan ide atau gagasan. Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam sebuah negara.

HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas. Partai politik merupakan organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar. Definisi ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan definisi partai politik sebelumnya.

Partai politik bisa berdiri dengan kuat apabila terpenuhi tiga faktor antara lain; fikrah yang dalam, *tariqah* yang jelas, manusia yang bersih. Berangkat dari tiga faktor tersebut maka terbentuklah sel utama yang akan meningkat menjadi sel-sel kelompok kecil (*halāqah*) pertama dalam partai (*halāqah 'ulā lil hizb*) yang sekaligus akan menjadi pimpinan partai (*qiyābah hizb*).

Ikatan kepartaian dari sel-sel utama yang telah terbentuk tersebut merupakan aqidah yang darinya terpancar falsafah partai serta *saqāfah* yang

¹⁸ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj M. Maghfur W (Bangil: Al Izzah, 2002), hlm. 47.

sejalan dengan persepsi partai yang akan mengantarkan pada perubahan menjadi sebuah partai ideologis (*ḥizb maḥda'*) yang utuh, yang bergerak demi sebuah kebangkitan yang benar.

Tahapan selanjutnya adalah partai akan memimpin umat untuk melakukan aktivitas perbaikan yang revolusioner untuk membangkitkan umat, dan kemudian bersama-sama umat mengemban *risālah* Islam kepada berbagai bangsa dan umat lain untuk melaksanakan kewajibannya pada umat manusia.

Partai tidak boleh bergabung ke dalam pemerintahan yang menerapkan hukum Islam secara parsial. Partai harus mengambil alih pemerintahan secara total dan menjadikannya sebagai metode untuk menerapkan ideologi secara bertahap, bagaimanapun juga keadaannya.

Partai ideologis akan menempuh tiga tahapan sampai dapat diterapkannya ideologi yang dimiliki di tengah masyarakat antara lain:

1. Tahapan pengkajian dan belajar untuk mendapatkan *ṣaḡāfah* partai.
2. Tahapan interaksi (*tafā'ul*) dengan masyarakat tempat partai tersebut tumbuh, sehingga ideologi partai dapat menjadi kebiasaan umum.
3. Tahapan pengambilalihan pucuk pemerintahan (kekuasaan) secara menyeluruh melalui dukungan umat, sampai partai tersebut dapat menjadikan pemerintahan sebagai metode untuk menerapkan ideologi atas umat karena ideologi merupakan risalah yang wajib diemban oleh umat dan negara. Inilah yang disebut dengan metode revolusioner.

3). Demokrasi dalam Perspektif HTI

Sekarang ini demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan-kecenderungan ini mau tidak mau mengalami keterpinggiran. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.¹⁹ Ideal dalam arti

¹⁹ Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang

manusiawi, egaliter dan berkeadilan. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Walaupun beberapa rezim itu secara empirik lebih mengedepankan keamanan daripada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi. Karenanya beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau sekurang-kurangnya, sedang dalam proses ke arah itu.

Agama dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan baik sebagai makhluk religius maupun makhluk sosial. Namun kedua konsep dan sistem nilai tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Secara teologis agama (khususnya Yahudi, Islam dan Nasrani) diyakini sebagai suatu sistem nilai atau doktrin yang datang dari Tuhan, bukan buatan atau rekayasa manusia. Sementara sosok demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia.²⁰ Dalam terminologi lain perilaku agama yang diimplementasikan manusia selalu mencari referensi dan justifikasinya pada firman Tuhan (*theo-centris*), sedangkan perilaku demokratis lebih menitik beratkan pada persoalan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya sebagai makhluk sosial dan legitimasinya diperoleh dari sesama manusia (*antropo-centris*)

Secara konseptual, agama banyak mengajarkan prinsip yang begitu progresif baik bagi demokrasi, keadilan ataupun kemajuan ekonomi. Prinsip seperti egalitarian, kedaulatan individu, kesalehan, kerja keras dan semangat mencari ilmu, bertaburan di kitab sucinya.

fundamental, *kedua* demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Lihat Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm.6

²⁰ Aswab Mahasin, "Agama Dan Demokrasi: Bukan Pohon Tanpa Akar" dalam Bernard Adeney Risakotta (editor), *Keadilan Dan HAM Dalam Perspektif Agama-Agama* (Yogyakarta: Sanata Dharma, 2001), hlm. 28

Namun sistem demokrasi yang merupakan kecenderungan dunia ini ditolak oleh HTI. Dalam gambaran mereka, demokrasi dalam pengertian suara mayoritas bertentangan dengan Islam. Sebab yang terpenting dalam Islam adalah kebenaran. Demokrasi yang merupakan produk dan sistem dari barat bukan cita-cita ideal mereka. Mereka justru menawarkan sistem Islam, dengan kembali kepada Islam masa Nabi secara total. Komitmen keagamaan ini menunjukkan betapa mereka merindukan masa kejayaan Islam klasik yang pernah dilalui umat Islam.

Ketidaksepakatan HTI terhadap demokrasi, terdapat dalam pandangan HTI terhadap demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Demokrasi bukan merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan wahyu Allah SWT, melainkan hanya berasal dari akal pikir manusia, hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem Islam yang pasti berasal dari Allah SWT, “terpuji dan tercelanya suatu perbuatan diputuskan oleh Allah SWT”.
2. Demokrasi berdasarkan akidah sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan, sekularisme menurutnya bermula dari kompromi gereja dengan kaum intelektual yang menentang otoritas gereja di Eropa pada masa abad pertengahan, maka dari itu sekularisme yang menjadi dasar demokrasi sangat bertentangan dengan Islam yang akidahnya adalah dua kalimat syahadat.
3. Demokrasi berdasar pada dua hal yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan, sedangkan menurut Hizbut Tahrir kedaulatan ada di tangan *syara'* bukan umat.
4. Demokrasi selalu menyandarkan pada keputusan mayoritas. Padahal dalam Islam menurutnya, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan jalan suara terbanyak. Masalah-masalah yang terkait dengan hukum tidak bersandar pada pendapat mayoritas, tetapi berdasarkan *naṣṣ-naṣṣ syara'*.
5. Demokrasi berbeda dengan Islam dalam membahas kebebasan individu berkaitan dengan kebebasan beragama, berpendapat, tingkah laku, dan kepemilikan.²¹

Padahal, apabila dilihat secara substansial negara Islam yang sebenarnya adalah pemerintahan yang berjalan secara demokratis, seiring dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam serta menegakkan keadilan. Pemerintah yang berasal dari rakyat, berbuat untuk rakyat, mempersatukan

²¹ *Ibid.*, hlm 121.

umat manusia, tidak membedakan antara golongan satu dengan lainnya meskipun berbeda-beda jenis, suku atau keyakinan. Pemerintahan seperti itu sangat memperhatikan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sejarah dan teknologi. Pemerintahan seperti itu juga mampu memotivasi masyarakat untuk selalu tolong menolong dan saling toleransi antara sesama golongan.

Penolakan mereka terhadap demokrasi adalah sesuatu yang naif, mengingat di dalam Islam ada sistem *syūrā*, yang secara prinsipil adalah bagian dari substansi demokrasi, meskipun secara prosedural Islam tidak persis sama dengan demokrasi. Sadek Jawad Sulaiman menyatakan bahwa sebagai sebuah konsep dan sekaligus juga prinsip, *syūrā* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Baik *syūrā* maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Kedua konsep tersebut juga mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Sebagai prinsip, *syūrā* dan demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.²²

D. Karakter Organisasi dan Model Gerakan

1. Karakter Organisasi

HTI sebagai sebuah partai ideologis Islam fundamentalis memiliki gerakan yang cukup militan. Penulis bisa melihat ketika HTI menyuarakan penentangan terhadap berbagai hal yang dianggap tidak berada pada jalur *kebilāfab* maupun jalur Islam versi mereka, kader HTI cukup massif untuk menggerakkan masanya. Meskipun dalam hal jumlah anggota HTI belum sebesar ormas Islam lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah, namun kader HTI memiliki kesadaran politik dan organisasi yang sangat tinggi.

HTI melakukan berbagai hal untuk mengembangkan pemikiran serta gerakannya, antara lain dengan membentuk *halāqah-halāqah*, mengomentari dan menanggapi berbagai isu kontemporer dengan menggunakan berbagai media, serta menyuarakan aspirasi mereka dengan melakukan aksi-aksi turun ke jalan. Selain itu, proses pengenalan cita-cita

²² *Ibid.*, hlm.122

mereka kepada masyarakat bukan hanya dilakukan melalui organisasi, melainkan juga dilakukan melalui perorangan²³.

Sebagaimana HT di berbagai negara lain, HTI memiliki beberapa tahapan dalam menetapkan langkah operasionalnya ;

1. Tahapan pembinaan dan pengkaderan (*tasqīf*) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah HT dan membentuk kerangka sebuah partai.
2. Tahap interaksi (*tafā'ul*) dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai perkara utama dalam kehidupan serba berusaha menerapkan dalam realitas kehidupan. Tahapan ini dapat juga disebut sebagai tahap revolusi pemikiran.
3. Tahap penerimaan kekuasaan (*istilā' al hukm*), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh, sekaligus menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia.

Beberapa tahapan tersebut ditegaskan kembali dalam tulisan aktifis HTI yang penuh semangat mengungkapkan bahwa perjuangan politik ini secara garis besar mencakup: pembinaan intensif untuk mencetak kader-kader dakwah, membina umat dengan *saqafah* Islam, serta mengkoreksi penguasa yang berseberangan dengan Islam dan merugikan umat misalnya dengan mendatangi parlemen dan penguasa untuk mengkritisi kebijakan politik mereka. HTI juga selalu berusaha membongkar kebiadaban penjajah seperti AS dan negara-negara sekutunya yang selama ini mencengkeram umat Islam, termasuk kerjasama mereka dengan para penguasa di negeri-negeri Islam.

Dengan aktivitas ini akan muncul kader-kader dakwah yang siap terjun untuk berdakwah sehingga terbentuk kesadaran umat untuk kembali pada Khilafah. Hal ini semakin diperkuat dengan dukungan *ablul qunwah* (elit politik strategis). Tiga hal inilah kaderisasi, kesadaran umat, dan dukungan elit politik kunci yang akan menjadi simpul keberhasilan dakwah. Aktivitas tersebut yang secara serius dilakukan oleh Hizbut Tahrir sekarang ini, termasuk di Indonesia.²⁴

HTI dikategorikan sebagai gerakan Islam yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Istilah militan dapat diartikan sebagai gerakan

²³ Pengalaman pribadi penulis ketika didatangi salah satu kader perempuan HTI Yogyakarta.

²⁴ <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada 14 September 2007.

yang memiliki semangat perjuangan sangat tinggi. Militansi dalam bahasa Arab disebut dengan *ibrāb, naz'ah qitāliyyah* yang berarti kecenderungan untuk berperang.²⁵ kelompok militan ini lebih cenderung keras, fundamental, serta tidak pantang menyerah dalam perjuangan visi dan misi organisasi mereka.

Perjuangan HTI dalam menyuarkan penegakan syari'ah dilakukan dengan kewajiban dakwah bagi setiap anggotanya. Tak jarang dari beberapa anggota HTI, baik laki-laki maupun perempuan melakukan dakwah dari pintu ke pintu (yang lebih sering disebut dengan sistem sel).²⁶

Oliver Roy menyebutkan bahwa kelompok Islam militan cenderung mendefinisikan Islam secara ketat, abadi dan sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah. Kelompok ini berusaha keras untuk merumuskan sebuah model masyarakat, sistem ekonomi dan politik, bahkan pendidikan, dengan syari'at sebagai satu-satunya prinsip normatif dan Islam merupakan sistem politik yang menyeluruh.²⁷ Beberapa kelompok Islam yang dikategorikan militan antara lain; Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir, Kelompok Islam bersenjata (GIA) dan FIS di Aljazair, Jemaat Al-Islam di Pakistan, Front Pembebasan Palestina, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia organisasi maupun gerakan yang dikategorikan militan antara lain; Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Komunikasi Ahli Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), sedangkan pada masa Orde Lama antara lain; DI TII, Darul Arqam, Abin, Kelompok Republik Islam.²⁸

HTI selalu menampakkan karakter gerakan mereka dengan menggunakan simbol-simbol tertentu seperti ikat kepala maupun bendera organisasi yang menggunakan kalimat *Lā ilāha Illa Allāh Muḥammad Rasūlullāh*. Simbol ini selalu mereka bawa dalam moment-moment tertentu yang diadakan oleh HTI seperti diskusi, demonstrasi dan lain-lain.

Gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh HTI selalu mengandung penentangan terhadap sistem yang mereka anggap kufur, seperti sistem

²⁵ Attabik Ali, *Kamus Ingris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 2003), hlm. 524.

²⁶ Pada era Orde Lama sistem ini kerap kali digunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menyuarkan agenda partai dan mendapatkan pendukung.

²⁷ Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal*, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Genta Press, 2005), hlm. 7

²⁸ Khamami Zada dan Arif R Arafah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 123.

demokrasi, liberal, sosialis. selain itu mereka juga menyuarakan penentangan yang tajam terhadap konstitusi yang dimiliki oleh negara demokrasi, seperti halnya di Indonesia, HTI menyuarakan ketidaksimpatikannya terhadap konstitusi yang dimiliki Indonesia.

Dalam mengembangkan organisasinya anggota HTI diwajibkan berpegang teguh pada *qānūn idāri* (Undang-Undang Dasar Gerakan). *Qānūn* ini memuat prinsip-prinsip pemikiran, ideologi dan *manhaj* gerakan. *Qānūn* ini disarikan dari berbagai kitab yang ditulis oleh para tokoh Hizbut Tahrir. Kitab-kitab ini menjadi rujukan dalam wawasan, sikap dan tindakan para aktifis Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Setiap wilayah harus berhubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat (*Lajnah Qiyādah Markaziyah*) yang dipimpin oleh seorang *amīr*. Pengurus wilayah juga harus melakukan pertanggungjawaban kepada pengurus internasionalnya. Semua proses ini dilakukan melalui hubungan virtual. Tidak ada mekanisme temu langsung seperti kongres ataupun muktamar.²⁹ Akan tetapi, HTI pernah beberapa kali menyelenggarakan konferensi *khilāfah* internasional pada tahun 2000 dan 2007.

Karakteristik HTI sebagai Partai Politik berideologi Islam terangkum dalam beberapa point yang diungkapkan oleh Haedar Nashir sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya karena seruan *amar ma'rūf nabi munkar*
2. Misi utama terbentuknya *dawlah Islāmiyah* dengan bentuk *khilāfah* Islam secara transnasional
3. Anggotanya adalah orang-orang yang bersedia terhimpun dalam sistem Islam tanpa batas ras, golongan, keturunan, bangsa maupun mazhab tertentu.
4. Aktivitas HTI bersifat politik.
5. Wilayah sasarannya adalah negeri-negeri Islam
6. landasan berfikir HTI adalah Al Qur'an, Sunnah, Ijmā' dan Qiyās
7. Metode dakwah yang diterapkan mengikuti perjalanan dan perjuangan dakwah Rasulullah saw dengan tahapan *tasqīf* (pembinaan pengkaderan), *tafā'ul* (berinteraksi), *istilāmu al hukmi* (penerimaan kekuasaan).

²⁹ Khamami Zada dan Arif R Arafah, *Diskursus ...*, hlm 101-102.

8. Pemikiran Hizbut Tahrir berlandaskan pada pemikiran Islam.³⁰

Sebagai partai politik HTI harus memperjuangkan terbentuknya *khilāfah Islāmiyah*. Untuk menuju ke sana, menjalin kekuatan bersama umat Islam lain harus dilakukan dengan memperkuat *ukhūwah Islāmiyah*. Kalau pembentukan *khilāfah* akan memakan waktu dan proses panjang maka yang bisa segera dicapai adalah pemberlakuan syari'at Islam. Menurut para tokohnya, formalisasi syari'at ini tidak akan menjadi potensi disintegrasi karena Islam menjadi *rahmatan lil 'ālamīn*, rahmat semua kelompok. Dalam situasi itu umat Islam diwajibkan menjaga keutuhan Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) karena wilayah ini akan menjadi bagian dari wilayah yang lebih luas, yaitu bagian dari kekhalifahan Islam.

Pendirian HT di Indonesia dimaksudkan untuk menyiapkan kondisi bilamana suatu saat kekhalifahan didirikan. Di samping itu secara struktural Hizbut Tahrir yang berdiri di satu negara tertentu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Hizbut Tahrir di negara lainnya. Dalam konteks ini Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu wilayah di bawah naungan Hizbut Tahrir Pusat.

HTI memiliki hirarki yang cukup jelas dalam kepengurusan, keputusan-keputusan besar adalah melalui majelis umat, *khilāfah*, *mu'āwin* (para pembantu), para wali, para qāḍi (hakim), panglima perang berikut militernya dan kepala administrasi.³¹ Struktur ini mengambil contoh pada struktur kepemimpinan yang dipraktekkan Rasulullah ketika menegakkan negara Islam. Dalam pandangan HTI, Rasulullah menjalankan sendiri struktur ini dan menyempurnakannya semasa hidupnya. Walhasil, semasa Rasul di Madinah, struktur *dawlah Islāmiyah* sudah terbentuk secara sempurna. Struktur ini kemudian diteruskan pasca kepemimpinan Nabi SAW selaku kepala negara oleh *khulafā'urrāsīdīn* dan terus berlangsung sepanjang sejarah kekhalifahan Islam.

Hizbut Tahrir Indonesia berhasil membangun jaringan kerja di antara berbagai organisasi Islam di Indonesia seperti mendirikan Forum Umat Islam, yang di dalamnya tergabung 31 organisasi Islam seperti;

³⁰ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007), hlm. 409-411.

³¹ Seperti penentuan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha maupun keputusan yang menyatakan sikap HTI terhadap barat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber dasar HTI.

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan ormas lain yang mendukung terselenggaranya Konferensi Khilafah International pada 12 Agustus 2007.³² Pengakuan yang sangat mengejutkan dari organisasi Islam di Indonesia. Klaim ini mengembangkan wacana bahwa mungkin hanya HTI satu-satunya organisasi yang dapat mendudukkan secara bersama-sama organisasi Islam di Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Namun juga perlu dilihat apakah tokoh yang menghadiri undangan HTI tersebut merupakan representasi organisasi?.

Gerakan perjuangan penegakan syari'at Islam di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh HTI, kita kenal Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) yang juga melakukan perjuangan yang seirama. Meskipun demikian antara HTI, MMI, dan KPPSI memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam beberapa hal. Seperti halnya dalam hal metode pendekatan yang mereka gunakan, HTI lebih kepada pemikiran bahwa penegakan syari'at Islam akan terlaksana dengan berdirinya *khilāfah*, sedangkan MMI memandang bahwa tegaknya syari'at Islam tidak harus dalam bentuk atau format negara tertentu. Sedangkan KPPSI bergerak pada lini penerapan Syariat Islam yang diawali dari daerah-daerah atau yang sering penulis kenal dengan Peraturan Daerah Syari'at. Selain itu, di antara organisasi pejuang penegakan syari'at ini juga memiliki perbedaan dari aspek kelembagaan.

Meskipun HTI, MMI, dan KPPSI memiliki perbedaan dalam hal sasaran dan struktur kelembagaan, akan tetapi dalam hal substansi dan pemikiran pada dasarnya memiliki kesamaan. Hal inilah yang menjadikan ketiganya seringkali bekerjasama dalam menyuarakan perjuangan Syari'at Islam di Indonesia.³³

E. Implikasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Lalu bagaimana prospek HTI ini ke depan? Jika keberhasilan suatu gerakan sosial dilihat dari seberapa jauh gerakan itu bepergian dari tempat asalnya, HTI adalah gerakan yang cukup berhasil. Apalagi di era reformasi

³² Pengantar Makalah Konferensi *Khilāfah* International pada 12 Agustus 2007.

³³ lihat Haedar Nashir, *Gerakan...*, hlm. 422.

ini, dengan adanya kebebasan memberikan ruang gerak bagi semua gerakan untuk merealisasikan ide-ide dan harapan mereka karena sistem yang lebih demokratis memungkinkan hal itu. Memang tak ada data statistik yang cukup akurat, tetapi dari catatan beberapa pengamat memperlihatkan bahwa HTI, mengklaim telah mempunyai anggota sebanyak 100 ribu orang.

HTI akan menjadi kekuatan penting dalam perubahan sosial jika mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang melilit bangsa ini. HTI mampu menawarkan suatu model tentang masyarakat dan pemerintahan yang benar-benar khas dan mencerminkan nilai Islam substantif yang dibedakan dari model barat, sebagaimana obsesi mereka. Gerakan mereka akan gagal jika yang dilakukan adalah memobilisasi rakyat di seputar mitos dan simbol keagamaan, misalnya kembali pada keaslian dan kemurnian Islam yang tidak pernah ada sehingga bersifat imajiner saja apalagi imajinasi mempersatukan dunia Islam dalam payung *kehilāfab*.

Pada dasarnya, Islam bukan sekedar simbolistik formal yang tampak, seperti pakaian, lafadz-lafdz al-Qur'an dan sejenisnya. Lebih dari itu Islam merupakan nilai-nilai ajaran yang substansinya bisa terwujud dalam kehidupan di mana pun, dan kapan pun. Tidak dibatasi oleh ruang budaya dan tradisi Arab saja, tetapi bisa diterapkan dalam ruang budaya dan tradisi di mana pun. Islam yang demikian ini, sering disebut Islam yang membumi. Artinya Islam yang dapat diterapkan dalam dunia manapun. Perlu dibedakan mana tradisi Arab dan mana ajaran Islam. Pakaian dengan disain dan modelnya adalah sebuah hasil kebudayaan manusia, nilai ajaran menutup aurat adalah ajaran Islam. Jadi pakaian Islam adalah pakaian yang didasarkan atas ajaran menutup aurat secara baik, sekaligus memenuhi disain dan model sesuai dengan kebudayaan yang berkembang di mana saja, tidak hanya Arab dan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, duplikasi ajaran Islam pada zaman Nabi sah-sah saja, tetapi kalau kebudayaannya dianggap sebagai ajaran Islam menjadikan bias ajaran tidak terelakkan. Inilah salah satu penyebab terjadinya bias gender dalam ajaran Islam. Konstruksi kebudayaan yang menjadi bagian dari perkembangan sejarah umat Islam dianggap juga sebagai ajaran. Padahal konstruksi itu sangat meminggirkan kaum perempuan. Yang muncul adalah seolah Islam merupakan ajaran yang meminggirkan kaum perempuan. Contoh masalah poligami, hak waris, dan masalah-masalah hukum lain yang menyangkut pembatasan kaum perempuan. Padahal kalau dikaji lebih dalam tidaklah demikian.

Syari'at Islam dipandang oleh pengikut HTI sebagai ajaran lengkap dan absolut kebenarannya. Oleh sebab itu, ajaran Islam harus diterapkan sebagai ajaran yang tidak diragukan lagi dalam seluruh aspek kehidupan secara sempurna (*kaffah*). Timbulnya persoalan-persoalan kehidupan umat Islam selama ini akibat tidak lagi menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya secara *kaffah*. Bagi mereka dengan diterapkannya syari'at Islam dalam realitas kehidupan secara *kaffah* maka akan tercipta tatanan harmonis yang disebut sebagai *baladatum thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri indah yang diampuni oleh Tuhannya).

Bagi mereka demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Islam dan berpeluang untuk menimbulkan kerusakan dan kerusakan bagi ummat Islam. Di balik penolakan terhadap demokrasi tersimpan gagasan tentang negara Islam yang dibayangkan sebagai suatu sistem di mana legitimasi penguasa didasarkan pada kekuasaan mutlak Allah SWT atau dengan kata lain berprinsip pada syari'ah.³⁴

F. Penutup dan Tawaran Akademik

Secara hermeneutis memang terdapat keterkaitan erat antara pemikiran dan konsepsi khilafah HTI dan latar *Weltanschauung* mereka. Secara hermeneutis latar dimaksud menunjuk pada prasangka, kondisi historis (*historical situatednes*), dan latar tradisi HTI. Secara langsung maupun tidak, anasir hermeneutik itu membangun atau mewarnai horison HTI dalam menderivasi pesan tekstual ajaran Islam seputar negara dan pemerintahan. Jadi para anggota HTI itu tidaklah berawal dari kekosongan dalam situasi vakum budaya. Ia muncul sebagai refleksi langsung dari gugusan pengalaman panjang pengetahuan dan kehidupan mereka. Kemunculannya menjadi satu warna tersendiri dalam proses demokrasi di Indonesia.

Jika melihat model gerakan HTI terkesan bahwa Islam politik sebenarnya bukanlah Islam yang identik dengan kekerasan, seperti banyak dipersepsikan banyak orang, tetapi Islam Politik, sebagaimana agama itu sendiri, tidaklah kebal terhadap manipulasi yang berujung tindakan kekerasan. Islam politik lebih merupakan aktivisme yang berkomitmen mewujudkan agenda politik tertentu dengan menggunakan simbol, doktrin, bahasa, gagasan dan ideologi Islam. Agenda politik di sini

³⁴ Norhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep, Genealogi dan Teori* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 174-175

memiliki pengertian yang sangat luas, dari sekedar memperjuangkan aspirasi hak politik sampai mengalahkan atau menjatuhkan rezim yang berkuasa.³⁵

Oleh karena itu, negara perlu mengeluarkan ijtihad terkait dengan eksistensi gerakan Islam politik ideologis semacam HTI, sehingga ganjalan perwujudan demokrasi secara substansial dan prosedural di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini terpenjarakan. Jika diabaikan begitu saja eksistensi kelompok-kelompok Islam semacam HTI, maka bukan tidak mungkin perpecahan negara dan pengingkaran terhadap konstitusi NKRI akan terus berkembang layaknya jamur di musim hujan.

Daftar Pustaka

- A Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro dan SR-Ins Team, *Negara Tuban The Thematic Enciclopaedia*.
- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. M. Maghfur W, Bangil: Al Izzah, 2002.
- Ainu Rafiq Al –Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2012).
- Al-Waie* No 67 Tahun VI, Edisi Khusus Maret 2006.
- Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 2003.
- Bernard Adeney Risakotta (editor), *Keadilan Dan HAM Dalam Perspektif Agama-Agama*, Yogyakarta: Sanata Dharma, 2001.
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP, 2007.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tabrir; Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish ,Jakarta, Pustaka Thariql Izzah, cet 3, 2002.
- <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, diakses pada 14 September 2007.
- John L Esposito dan John O Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem dan Prospek*, terj. Rahman Astuti, Bandung: Mizan, 1999.

³⁵ Ibid., hlm. 10

- Khamami Zada dan Arif R Arafah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004.
- M Zainudin, *Perjuangan Pengambilan Kekuasaan Studi Tentang Khilafah Perspektif Hizbu Tabrir Indonesia*, Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tabrir*, terjemahan Abu Afif dan Nurkholis Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002.
- Norhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer Konsep, Gegeologi dan Teori*, Yogyakarta: Suka Press, 2012
- Oliver Roy, *Genealogi Islam Radikal*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Genta Press, 2005.
- Pengantar Makalah Konferensi *Khilafah International* pada 12 Agustus 2007.
- qalbusalim.wordpress.com*
- Sabili* No.9 th.X 2003, "Sejarah Emas Muslim Indonesia"
- Sheikh Salim Ibn Led Al-Hilali, *Al Jama'ah al-Islamiyah fi Za'ul al-Kitab wa al-Sunnah bi Fahmi Salaf Al-Ummah*, Terj. Abu Ihsan Solo: Pustaka Imam Bukhari, 2004
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: HTI, 2001
- WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran Akar Ideologis dan Penyebarannya*, Jakarta: Al-P'tishom Cahaya Umat, 2002,